

**LAPORAN KEUANGAN UNIT  
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
TAHUNAN TA 2023**

**BALAI VETERINER  
SUBANG**

**Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2023**



Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT 33  
RW 11 Kelurahan Dangdeur Subang 41212  
Telp. (0260) 7423134 Fax 7423178

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Veteriner Subang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Veteriner Subang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Subang, 31 Desember 2023  
Kepala Balai Veteriner Subang

drh. Soedirun, MP.  
NIP. 197009081999031002

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	
II Neraca	
III Laporan Operasional	
IV Laporan Perubahan Ekuitas	
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	

- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud
- C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- C.34 Aset Lain-lain
- C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
- C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
- C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
- C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
- C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
- C.42 Uang Muka dari KPPN
- C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
- C.44 Ekuitas
- C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
- D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
  - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
  - D.8 Beban Bantuan Sosial
  - D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
  - D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
  - D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
  - D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
  - D.14 Pos Luar Biasa
  - D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
- E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1 Ekuitas Awal
  - E.2 Surplus (Defisit) LO
  - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
  - E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
  - E.5 Transaksi Antar Entitas
  - E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas

VI. Lampiran dan Daftar



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER SUBANG**

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat  
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178  
Website. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>  
Email. [bvetsubang@pertanian.go.id](mailto:bvetsubang@pertanian.go.id), [bvet.subang@gmail.com](mailto:bvet.subang@gmail.com)

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Veteriner Subang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Subang, 31 Desember 2023  
Kepala Balai Veteriner Subang

drh. Sedirun, MP.

NIP. 197009081999031002

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. PROFILE DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis

Balai Veteriner Subang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

### A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Veteriner Subang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

### A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

### A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Veteriner Subang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%



<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

##### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. PROFILE DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis

Balai Veteriner Subang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

### A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Veteriner Subang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

### A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

### A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Veteriner Subang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

##### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek**  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang**  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	870.000.000	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>870.000.000</b>	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	3.782.238.000	3.681.688.000
Belanja Barang	38.867.690.000	34.047.431.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>42.649.928.000</b>	<b>37.729.119.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp1400608005,0

#### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1400608005,0 atau mencapai ,000 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp,0. Pendapatan Balai Veteriner Subang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp,0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1400608005,0. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

##### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	870.000.000	1.400.608.005	-
<b>Jumlah</b>	<b>870.000.000</b>	<b>1.400.608.005</b>	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 7,33109 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

##### Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.400.608.005	1.511.410.970	(7,33)
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.608.005</b>	<b>1.511.410.970</b>	<b>(7,33)</b>

Realisasi Penerimaan  
Pajak Rp,0

#### B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Penerimaan Pajak TA TA 2023 sebesar ,000 dari TA 2022.

Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

##### Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

##### Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Pendapatan</b>	-	-	-
<b>Pendapatan Pajak/Bea Cukai</b>	-	-	-

Realisasi Penerimaan  
Negara Bukan Pajak  
Rp1400608005,0

### B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1400608005,0 dan Rp1511410970,0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 7,33109 dari TA 2022 setoran sitaan hasil korupsi di tahun 2020 meningkat drastis. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.400.608.005	1.511.410.970	(7,33)
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.608.005</b>	<b>1.511.410.970</b>	<b>(7,33)</b>

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.030.505	5.030.505	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.350.000	850.000	58,82
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.361.675.500	1.421.748.000	(4,23)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	24.200.000	-	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.200.000	15.100.000	(92,05)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	7.152.000	68.682.465	(89,59)
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.608.005</b>	<b>1.511.410.970</b>	<b>(7,33)</b>

Realisasi Belanja  
Rp37000209336,0

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp37000209336,0 atau 98,06804 % dari anggaran belanja sebesar Rp.37729119000,0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA		% thdp Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	3.681.688.000	3.569.277.553	96,95
Belanja Barang	34.047.431.000	33.430.931.783	98,19
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>37.729.119.000</b>	<b>37.000.209.336</b>	<b>98,07</b>

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 32,98672% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	3.569.277.553	3.686.763.336	(3,19)
Belanja Barang	33.430.931.783	51.399.160.180	(34,96)
Belanja Modal	-	127.321.900	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>37.000.209.336</b>	<b>55.213.245.416</b>	<b>(32,99)</b>

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp3569277553,0

#### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3569277553,0 dan Rp3686763336,0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,18669 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi antar satker

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.303.626.900	2.461.282.765	(6,41)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.670	35.416	3,54
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	171.022.530	168.767.092	1,34
Belanja Tunj. Anak PNS	58.109.048	55.959.431	3,84
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	23.400.000	7,69
Belanja Tunj. Fungsional PNS	457.440.000	416.610.000	9,80
Belanja Tunj. PPh PNS	9.779.435	8.753.255	11,72
Belanja Tunj. Beras PNS	149.836.980	146.143.560	2,53
Belanja Uang Makan PNS	295.258.000	317.002.000	(6,86)
Belanja Tunjangan Umum PNS	16.070.000	24.550.000	(34,54)
Belanja Uang Lembur	82.898.000	64.990.000	27,56
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>3.569.277.563</b>	<b>3.687.493.519</b>	<b>(3,21)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	10	730.183	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.569.277.553</b>	<b>3.686.763.336</b>	<b>(3,19)</b>

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp33430931783,0

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33430931783,0 dan Rp51399160180,0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 34,95821% dari Realisasi TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.095.712.069	2.211.214.485	(5,22)
Belanja Barang Non Operasional	1.806.060.617	3.457.838.671	(47,77)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.275.913.078	20.105.255.587	(73,76)
Belanja Jasa	947.878.202	767.195.308	23,55
Belanja Pemeliharaan	1.718.892.151	1.748.528.483	(1,69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.749.975.666	5.247.857.646	9,57
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	15.836.500.000	17.862.000.000	(11,34)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>33.430.931.783</b>	<b>51.399.890.180</b>	<b>(34,96)</b>
Pengembalian Belanja	-	730.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.430.931.783</b>	<b>51.399.160.180</b>	<b>(34,96)</b>

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut. Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp,0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp,0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal Rp,0

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp127321900,0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,000% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh Tidak terdapat anggaran pada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	127.321.900	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>127.321.900</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>127.321.900</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Belanja  
Modal Tanah Rp,0

### B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp127321900,0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal Peralatan dan  
Mesin Rp,0

### B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp127321900,0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal Gedung dan  
Bangunan Rp,0

### B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal, Jalan, Irigasi  
dan Jaringan Rp,0

### B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Modal Lainnya Rp,0

### B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Bantuan Sosial Rp,0

### B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

<b>URAIAN JENIS BELANJA</b>	<b>REALISASI T.A. 2023</b>	<b>REALISASI T.A. 2022</b>	<b>%</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

**B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran**

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan  
Perpajakan Rp,0

### D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp1400608005,0

### D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1400608005,0 dan Rp1464736505,0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,37816. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.030.505	5.030.505,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.350.000	850.000,00	58,82
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.361.675.500	1.421.748.000,00	(4,23)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	24.200.000	-	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1.200.000	15.100.000,00	(92,05)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	7.152.000	22.008.000,00	(67,50)
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.608.005,00</b>	<b>1.464.736.505,00</b>	<b>(4,38)</b>

Beban Pegawai  
Rp3569277553,0

### D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3569277553,0 dan Rp3656980336,0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 2,39823 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.303.626.900	2.461.282.765	(6,41)
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.660	35.233	4,05
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	171.022.530	168.767.092	1,34
Beban Tunj. Anak PNS	58.109.048	55.959.431	3,84
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	23.400.000	7,69
Beban Tunj. Fungsional PNS	457.440.000	416.425.000	9,85
Beban Tunj. PPh PNS	9.779.435	8.753.255	11,72
Beban Tunj. Beras PNS	149.836.980	146.143.560	2,53
Beban Uang Makan PNS	295.258.000	287.219.000	2,80
Beban Tunjangan Umum PNS	16.070.000	24.005.000	(33,06)
Beban Uang Lembur	82.898.000	64.990.000	27,56
<b>Jumlah</b>	<b>3.569.277.553</b>	<b>3.656.980.336</b>	<b>(2,40)</b>

Beban Persediaan  
Rp4215133983,0

#### D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4215133983,0 dan Rp20083330590,0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 79,01178 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	711.690.886	3.282.748.771	(78,32)
Beban Persediaan bahan baku	3.488.861.137	16.751.053.219	(79,17)
Beban Persediaan Lainnya	14.581.960	49.528.600	(70,56)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>4.215.133.983,00</b>	<b>20.083.330.590</b>	<b>(79,01)</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp4857983248,0

#### D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4857983248,0 dan Rp6377100142,0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23,82144 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Belanja untk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.622.284.880	1.739.756.660	(6,75)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24.827.719	20.793.000	19,40
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	235.456.000	237.756.000	(0,97)
Beban Barang Operasional Lainnya	213.143.470	212.908.825	0,11
Beban Bahan	203.298.959	1.204.540.996	(83,12)
Beban Honor Output Kegiatan	108.920.000	186.400.000	(41,57)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.493.841.658	2.066.897.675	(27,73)
Beban Langganan Listrik	813.034.758	595.286.390	36,58
Beban Langganan Telepon	62.435.195	59.896.061	4,24
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17.090.609	7.064.535	141,92
Beban Sewa	17.750.000	17.600.000	0,85
Beban Jasa Profesi	45.900.000	28.200.000	62,77
<b>Jumlah</b>	<b>4.857.983.248</b>	<b>6.377.100.142,00</b>	<b>(23,82)</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp1719108015,0

#### D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1719108015,0 dan Rp1750124029,0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,77222 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	212.491.300	326.130.418	(34,84)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	35.104.500	61.174.000	(42,62)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.174.118.701	913.100.744	28,59
Beban Pemeliharaan Jaringan	297.177.650	448.123.321	(33,68)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	215.864	1.595.546	(86,47)
<b>Jumlah</b>	<b>1.719.108.015</b>	<b>1.750.124.029</b>	<b>(1,77)</b>



Beban Perjalanan Dinas  
Rp5749975666,0

#### D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5749975666,0 dan Rp5247857646,0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,56806 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	3.887.472.579	3.689.574.833	5,36
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.715.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000.000	300.000.000	66,67
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.356.788.087	1.258.282.813	7,83
<b>Jumlah</b>	<b>5.749.975.666,00</b>	<b>5.247.857.646</b>	<b>9,57</b>

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
Rp15836500000,0

#### D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15836500000,0 dan Rp19536000000,0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 18,93683 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual	15.836.500.000	19.536.000.000,00	(18,94)
<b>Jumlah</b>	<b>15.836.500.000,00</b>	<b>19.536.000.000</b>	<b>(18,94)</b>

Catatan :

- 1 Beban Barang untuk diserahkan kepada kelompok ternak dalam bentuk Sapi indukan dan Ayam sebanyak 26.000 ekor.
- 2 Bantuan Ayam diserahkan kepada 52 kelompok ternak masing-masing sebanyak 500 ekor yang tersebar dalam beberapa propinsi (Banten = 6 kelompok, Jawa Barat = 38 kelompok, Jawa Timur = 2 kelompok, NTT = 6 kelompok)
- 3 Bantuan Sapi diserahkan kepada 50 kelompok ternak masing-masing sebanyak 20 ekor yang tersebar dalam beberapa propinsi (Banten = 1 kelompok, Jawa Barat = 48 kelompok, Jawa Timur = 1 kelompok)

Beban Bantuan Sosial  
Rp,0

#### D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp,0

#### D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1735461863,0 dan Rp2670073366,0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.245.310.640	2.046.007.445	(39,13)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321.020.974	321.020.972	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	34.129.011	103.591.411	(67,05)
Beban Penyusutan Irigasi	3.376.468	78.895.468	(95,72)
Beban Penyusutan Jaringan	131.624.770	120.558.070	9,18
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.735.461.863</b>	<b>2.670.073.366</b>	<b>(35,00)</b>
	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.735.461.863</b>	<b>2.670.073.366</b>	<b>(35,00)</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp,0

**D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp-112983,0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	(112.983)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	-	<b>(112.983)</b>	<b>(100)</b>

Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp,0

**D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindah tangan BMN Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit)  
Penyelesaian  
Kewajiban Jangka  
Panjang Rp,0

**D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp,0

**D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp185000,0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	185.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	-	<b>185.000</b>	<b>(100,00)</b>

Pos Luar Biasa Rp,0

**D.15 Pos Luar Biasa**

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>REALISASI T.A.2023</b>	<b>REALISASI T.A. 2022</b>	<b>%</b>
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

**D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19**

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut :

*Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2023 dan 2022*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>REALISASI T.A.2023</b>	<b>REALISASI T.A. 2022</b>	<b>%</b>
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

**D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional**

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
Rp.49.352.067.800,00  
0

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.49.352.067.800,00 dan Rp.53.680.798.280,00

*Defisit LO*  
Rp.34.547.370.460,00  
0

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.36.282.832.323,000 dan Rp.57.856.431.621,000. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.,000*

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai  
Aset Rp.,000*

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp,000*

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,000 dan Rp.,000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp,000*

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih Revaluasi Aset  
Rp.,000*

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,000 dan Rp.,000.

Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### *Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp,0

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023*

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp,0

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

*Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp35599601331,0

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.35599601331,0 dan Rp.53702379446,0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

*Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	37.000.209.336
Diterima dari Entitas Lain	(1.400.608.005)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>35.599.601.331</b>

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 37000209336,0, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1400608005,0

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp -339900000,0 terdiri dari :

*Rincian Transfer Keluar Tahun 2023*

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 (zuzu NKR 55E dengan Nomor Polisi B 7836 QK)	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	-339.900.000
<b>Jumlah</b>		<b>(339.900.000)</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 458000000,0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 (Mitsubishi Pajero Sport 2,5-E GL X MT dengan Nomor Polisi B 1130 EQ)	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	458.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>458.000.000</b>

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar ,0 dari total Rp,0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar ,0 dari total Rp,0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :*

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		-
Pengesahan Pengembalian Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>		-

*Ekuitas Akhir  
Rp50404298671,0*

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.48.668.836.808,000 dan Rp.49.526.746.105,000.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

#### F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

##### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

##### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp,0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp,0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp,0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Belanja Dibayar  
Dimuka (prepaid)  
Rp,0

### C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Uang Muka Belanja  
(prepayment) Rp,0

### C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

*Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp,0

**C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp,0. dan Rp,0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Perpajakan Rp,0

**C.7 Piutang Perpajakan**

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp,0

**C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	%	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Pajak</b>			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Piutang Bukan Pajak Rp,0

**C.9 Piutang Bukan Pajak**

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp,0

**C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

*Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp,0*

**C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022*

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp,0*

**C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

*Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp,0*

**C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan*

Jenis	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp,0*

**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			



Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-

Persediaan  
Rp1283194337,0

### C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1283194337,0 dan Rp222631106,0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	249.988.496	106.483.804
Bahan untuk Pemeliharaan	336.056	551.920
Bahan Baku	989.383.467	91.899.697
Persediaan Lainnya	43.486.318	23.695.685
<b>Jumlah</b>	<b>1.283.194.337</b>	<b>222.631.106</b>

### Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2023. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

#### Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Persediaan yang  
Belum Diregister  
Rp,0

### C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi Rp,0

### C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Tagihan  
Penjualan Angsuran  
Rp,0

### C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

#### Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp,0

### C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp,0

### C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka	%	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak</b>	-		-

Properti Investasi Rp,0

### C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut :

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp,0

### C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp27656750000,0

### C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp27656750000,0 dan Rp27656750000,0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>27.656.750.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>27.656.750.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2023*

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	45.000 m2	Jl. Terusan Garuda, Blok Werasari RT.33/11, Dangdeur, Subang	24.750.000.000
2	5.285 m2		2.906.750.000
<b>Jumlah</b>			<b>27.656.750.000</b>

Tanah Belum  
Diregister Rp,0

#### C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp,0 dan Rp,0.

Peralatan dan Mesin  
Rp42377722862,0

#### C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp42377722862,0 dan Rp42259622862,0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>42.259.622.862</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	458.000.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	(339.900.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>42.377.722.862</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(37.982.310.502)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>4.395.412.360</b>

- 1 Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa : Jeep Merk Mitsubitshi Pajero Sport 2,5-E GL X MT dengan Nomor Polisi B 1130 EQ
- 2 Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa : Izuzu NKR 55E dengan Nomor Polisi B 7836 QK

Peralatan dan Mesin  
Belum Diregister  
Rp,0

#### C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp14440390000,0

#### C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14440390000,0 dan Rp14440390000,0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>14.440.390.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>14.440.390.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.934.217.750)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>12.506.172.250</b>

Gedung dan  
Bangunan Belum  
Diregister Rp,0

#### C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0.

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp4901915169,0

#### C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.4901915169,0 dan Rp.4901915169,0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>4.901.915.169</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per</b>	<b>4.901.915.169</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(2.143.282.462)
<b>Nilai Buku per</b>	<b>2.758.632.707</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp,0

### C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0.

Aset Tetap Lainnya Rp137564800,0

### C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.137564800,0 dan Rp.137564800,0. Aset tetap tersebut. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>137.564.800</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>137.564.800</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>137.564.800</b>

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp,0

### C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.,0 dan Rp.,0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp,0

### C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Perolehan/Penambahan KDP	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp41224733786,0

### C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp42059810714,0 dan Rp40206248851,0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2023*

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	42.377.722.862	(37.982.310.502)	4.395.412.360
2	Gedung dan Bangunan	14.440.390.000	(1.934.217.750)	12.506.172.250
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.901.915.169	(2.143.282.462)	2.758.632.707
4	Aset Tetap Lainnya	137.564.800	-	137.564.800
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>61.857.592.831</b>	<b>(42.059.810.714)</b>	<b>19.797.782.117</b>

Aset Konsesi Jasa Rp,0

### C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp,0 dan Rp,0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp,0

**C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2023

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
	<b>Jumlah</b>	-

Aset Tak Berwujud Rp,0

**C.38 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Veteriner Subang berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp,0

**C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.,0 dan Rp.,0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per</b>	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp,0

**C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
Dana Lainnya	-	-
<b>Total</b>	-	-

Dana Cadangan  
Perwakilan RI di Luar  
Negeri Rp,0

#### C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Aset Lain-lain Rp,0

#### C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Lainnya yang  
Belum Diregister  
Rp,0

#### C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya ,0

#### C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp,0 dan Rp,0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

##### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp68889646,0

#### C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68889646,0 dan Rp60557286,0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	68.889.646	60.557.286
<b>Total</b>	<b>68.889.646</b>	<b>60.557.286</b>

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga : Pemakaian langganan daya dan jasa (Listrik, Telepon dan Air) bulan Desember 2023

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp,0

#### C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Hibah Yang Belum Disahkan Rp,0

#### C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Hibah Yang Belum Disahkan*

Uraian	Jumlah
	-
<b>Jumlah</b>	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp,0

#### C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

*Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Pendapatan Diterima Dimuka Rp,0

#### C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp,0

#### C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	-

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp,0

#### C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Kewajiban Konsesi  
Jasa Rp,0

#### C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp,0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

*Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Ekuitas  
Rp49503913736,0

#### C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49503913736,0. dan Rp49352067800,0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**